



Judul : Stabilkan pasar obligasi, komisi XI: aktifkan mekanisme BSF
Tanggal : Senin, 18 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Stabilkan Pasar Obligasi Komisi XI: Aktifkan Mekanisme BSF

KOMISI XI DPR khawatir dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang menembus level Rp 17.600 pada Jumat (15/05/2026). Kenaikan dolar itu bisa menyebabkan inflasi barang-barang impor.

Menyikapi kondisi ini, Anggota Komisi XI DPR Erik Hermawan mengingatkan Pemerintah dan otoritas moneter untuk segera memperkuat bauran kebijakan untuk memitigasi dampak kenaikan dolar AS. Utamanya dalam penuliran terhadap stabilitas makroekonomi dan daya beli masyarakat.

Dia mengatakan, pelemahan rupiah saat ini dipicu oleh tekanan ganda yakni faktor eksternal dan internal.

Faktor eksternal berupa eskalasi geopolitik global di Timur Tengah (Timgeng) yang memicu *capital outflow* atau pergerakan keluarannya modal investasi dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan faktor internal berupa persepsi risiko fiskal ke depan.

Dia menyebut, struktur industri nasional yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor, khususnya di sektor kimia, tekstil, elektronik, hingga farmasi.

"Sehingga depresiasi ini dipastikan akan mendorong biaya produksi," ujar Erik dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Indonesia, kata Erik, sedang menghadapi ancaman inflasi barang impor yang nyata. Ketika biaya modal dan bahan baku melonjak akibat melemahnya rupiah, maka produsen dihadapkan pada pilihan sulit. Yaitu, mengikis margin keuntungan atau membebankan biaya tersebut kepada konsumen melalui kenaikan harga.

"Di tingkat akar rumput, perajin komoditas pangan seperti tahu dan tempe sudah mulai kelabakan menyiasati harga kedelai domestik yang melambung jauh di atas harga internasional," ujar politisi Partai Golkar ini.

Karena itu, ia mengapresiasi sejumlah langkah taktis yang telah disiapkan oleh Bank Indonesia (BI), termasuk intervensi pasar valas dan pengetatan likui-

ditas dolar. Namun, stabilitas nilai tukar tidak bisa hanya bertumpu pada instrumen moneter semata. Diperlukan sinergi fiskal yang agresif dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk menjaga kesinambungan jangka pendek.

"Kami mendorong Pemerintah untuk segera mengaktifkan mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF) secara akuntabel demi meredam gejolak di pasar Surat Berharga Negara (SBN)," kata Erik.

BSF adalah dana khusus yang dibentuk oleh Pemerintah atau bank sentral untuk menstabilkan pasar obligasi.

Selain itu, ia mendesak pemanfaatan pos anggaran darurat atau situasi tidak terduga untuk merealisasikan subsidi ongkos logistik dan distribusi pangan. Utamanya pada komoditas pokok yang harga ecerannya mulai melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Erik juga menyoroti adanya anomali asimetri harga pada tana niaga komoditas impor seperti kedelai. Terdapat jeda waktu dan distorsi pasar yang membuat harga domestik tetap tinggi meskipun harga komoditas global sedang turun.

Atas situasi ini, kementerian terkait bersama lembaga pengawas untuk meningkatkan penetrasi pengawasan terhadap rantai pasok impor. Harapannya agar tidak terjadi praktik asimetri informasi yang merugikan pelaku UMKM.

"Respons kebijakan fiskal kita harus adaptif, cermat, dan terukur," ucapnya.

Dia menekankan, di tengah postur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang diakomodasikan untuk berbagai kementerian/lembaga strategis seperti Kementerian Pertahanan, Polri, hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemerintah wajib menjaga ruang fiskal yang sehat.

"Hal ini penting agar APBN tetap mampu berfungsi efektif sebagai peredam kejut demi mencegah terjadinya rasionalisasi tenaga kerja. Atau pelemahan daya beli masyarakat akibat depresiasi yang berkepanjangan," jelas Erik. ■ TIF